



PENGARUH KAPASITAS ANGGARAN DAERAH TERHADAP KASUS COVID 19 STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN BARAT

Ika Kurnia Indriani¹⁾
Agus Widodo²⁾
Murti Puspita Rukmi³⁾

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

¹⁾ikakurniaindriani@gmail.com

²⁾widodoagus1986@gmail.com

³⁾murti.uthy@gmail.com

Abstract

The covid 19 pandemic has had a major impact on regional economic conditions. The assessment of the financial condition of the regional government is one way to see the effect of budget capacity on the case of covid 19. The financial condition of the regional government will be seen from the high dimensional index value. This study aims to analyze the effect of budget capacity on cases of covid 19 and obtain a dimensional index of financial condition as an indicator of the region's ability to deal with the covid 19 pandemic. The results show that budget capacity of local government have simultaneous effect on covid 19 cases with sig. 0,001. PAD sig. 0,001, DAK sig 0,001, and regional capital expenditures sig. 0,012 have an partial effect on cases of covid 19. The financial condition of the regional government in West Kalimantan in good condition. This is illustrated by the best service solvency index being Sekadai, Ketapang, Landak, and Pontianak, the best financial independence dimension index is Pontianak, the best service solvency dimension index is Kayong Utara and Kapuas Hulu.

Keywords: Budget Capacity, Covid 19 Pandemic, Local Government, PAD, DAK

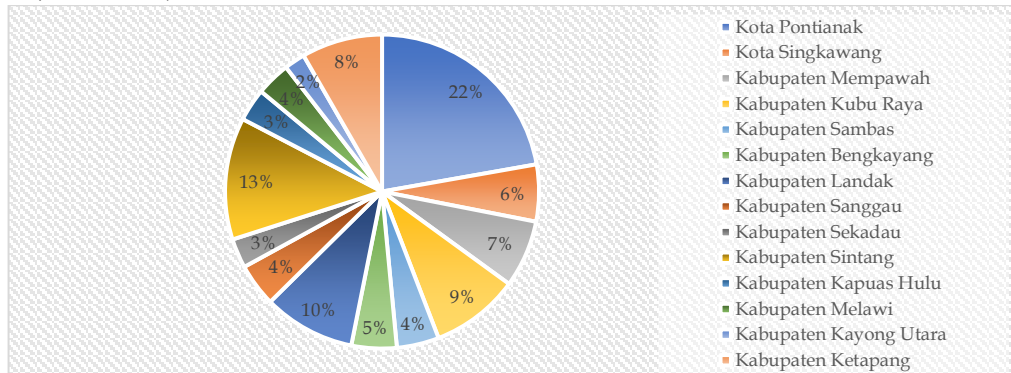
PENDAHULUAN

Kapasitas anggaran pemerintah menjadi faktor utama didalam penanggulangan kasus covid 19. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan ekonomi daerah. Penyebaran virus ini berdampak besar kepada perekonomian dunia akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Pandemi covid 19 berdampak besar terhadap perekonomian dunia (Haruhiko, 2020). Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah kasus 4.140.634 per tanggal 9 September 2021 (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Secara umum pandemi covid 19 berdampak kepada



pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan sejak pandemi terjadi pada bulan maret 2020. Pada kuartal pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi masih berada di level 3 persen, namun pada kuartal empat mengalami penurunan mencapai minus 5,3 persen (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada pada minus 2,1 persen (BPS, 2021).

Pada ekonomi Kalimantan Barat pandemi covid 19 membawa dampak negatif. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi daerah mencapai minus -4,46% pada triwulan ketiga (BPS Kalimantan Barat, 2020). Hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi masyarakat dan pembatasan sosial berskala besar. Jumlah kasus covid 19 Provinsi Kalimantan Barat mencapai 37.240 kasus per tanggal 9 September 2021 (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Kondisi ini menyebabkan wilayah Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori wilayah kuning (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Berdasarkan presentasi penyebaran kasus covid 19 di Kalimantan Barat, jumlah tertinggi ada di Kota Pontianak dengan 22% (gambar 1). Sedangkan pada wilayah kabupaten presentase penyebaran tertinggi pada Kabupaten Sintang 13%, Kabupaten Landak 10% dan Kabupaten Kubu Raya 9% (gambar 1).



Gambar 1.

Diagram Presentase Kasus Covid 19 di Kalimantan Barat

Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2021

Provinsi Kalimantan Barat memiliki keunikan didalam struktur geografis, demografis, dan adminitratif, sehingga berdampak cukup besar kepada kondisi keuangan pemerintah daerah pada saat menghadapi pandemi covid 19. Kondisi geografis ini menempatkan Kalimantan Barat menjadi provinsi terluas keempat di Indonesia dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53% luas wilayah Indonesia (BPS, 2020). Jumlah penduduk Kalimantan Barat merupakan yang terbanyak di pulau Kalimantan dengan total 5.457.352 jiwa pada tahun 2020 (Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat, 2020). Secara administratif Kalimantan Barat terdiri dari 12 pemerintah kabupaten dan 2 kota madya. Wilayah dengan jumlah kasus covid



tertinggi di Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak dengan kasus mencapai 7.890 (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2021). Kasus terkonfirmasi di wilayah Kabupaten Kubu Raya mencapai 3.437 kasus (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2021). Jumlah kasus covid 19 yang tinggi menyebabkan penyelenggaraan (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) PPKM level 4 di Kalimantan Barat (Kota Pontianak, 2021 b). Akibat pemberlakuan PPKM level 4 aktifitas masyarakat dibatasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pandemi menyebabkan gangguan pada ekonomi daerah dan membuat tekanan besar pada fiskal daerah dalam jangka pendek (Green & Loualiche, 2020). Pemerintah daerah mengalami pemangkasan anggaran pada APBD 2020 (Antarakalbar, 2020). Pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Realokasi anggaran pembangunan untuk penanganan covid 19 mencapai 50% (Antarakalbar, 2020).

Anggaran penanganan kasus covid 19 yang dialokasikan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Barat meliputi: pemerintah Kota Pontianak sebesar 53 milyar Rupiah (Kota Pontianak, 2021 a), Kabupaten Kubu Raya sebesar 57 milyar Rupiah (Kabupaten Kubu Raya, 2021), Kabupaten Landak sebesar 20 milyar Rupiah (Kompas, 2020), Kabupaten Sintang 40 milyar Rupiah (Antara, 2020), Kota Singkawang sebesar 20,21 milyar rupiah alokasi terbesar (Info Publik, 2020). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen krusial didalam penanganan covid 19 di Kalimantan Barat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada audit tahun 2020 mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana 1,035 triliun Rupiah untuk pandemi covid 19. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanggulangan pandemi sebesar 86,36 triliun Rupiah (Nugroho & Muhyiddin, 2021). BPK menjelaskan bahwa mata anggaran disusun dalam APBD benar-benar direalisasikan untuk rencana kerja yang matang dan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat khususnya pada saat menghadapi kondisi pandemi (Zami, 2020).

Pemerintah daerah akan menghadapi kondisi keuangan yang kurang baik akibat pandemi (National Association of Countries, 2020). Pemerintah daerah mengalami penurunan pendapatan dana transfer pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain akibat covid 19 (iNewsKalbar.id, 2020). PAD akan menurun, pendapatan dana transfer akan dialihkan untuk penanganan pandemi di daerah. Efisiensi belanja operasional, meningkatnya jumlah belanja modal untuk bidang kesehatan, meningkatnya jumlah belanja bantuan sosial dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah menghadapi kehilangan besar atas pendapatan dan peningkatan belanja diakibatkan covid 19 (Green & Loualiche, 2020). Pos-Pos pendapatan transfer yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah meliputi dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer



pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, dan dana transfer pemerintah provinsi lain (Sibua & Pribadi, 2019). Pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan daerah pada masa pandemi (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2021). Kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan relatif lemah khususnya dari tingkat kemandirian keuangan daerah (Indriani, Lestari, & Triyani, 2020).

Pemerintah daerah masih melakukan penanganan jangka pendek atas pandemi covid 19 (OECD, 2020). Penanganan pandemi covid 19 memerlukan kapasitas anggaran daerah yang baik. Kapasitas anggaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah penerimaan dan pengeluaran daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang sangat berpengaruh terhadap kapasitas anggaran daerah. Realisasi PAD dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal agar dapat meningkatkan PAD (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007). PAD memiliki peranan besar didalam struktur APBD daerah, namun porsi PAD terhadap APBD masing kecil (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007). Realisasi PAD akan sangat terpengaruh oleh pandemi covid 19, pemerintah daerah diproyeksikan akan kesulitan dalam memenuhi realisasi PAD dimasa pandemi. Pandemi covid 19 mengakibatkan penurunan pendapatan pajak karena menurunnya aktivitas ekonomi (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Pemerintah daerah mengalami penurunan pendapatan akibat covid 19. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan pajak, non pajak, fees, dan retribusi (Lilly, Tetlow, Davies, & Pope, 2020). Pendapatan Pemerintah daerah mengalami penurunan penerimaan pajak akibat pandemi (Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2021). Penurunan penerimaan pajak berakibat kepada anggaran pemerintah daerah di tahun selanjutnya (Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2021). Phroporsi realisasi PAD tahun anggaran 2019 pada pemerintah daerah di Kalimantan Barat sangatlah beragam. Realisasi PAD tertinggi terjadi di Kota Pontianak, sedangkan pemerintah daerah lain sangatlah kecil. Kondisi ini diduga akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghadapi pandemi. Kapasitas anggaran dari PAD dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam penanggulangan pandemi di wilayahnya. Penurunan pendapatan pemerintah daerah akan berdampak negatif pada anggaran, sehingga diperlukan manajemen keuangan yang baik agar tidak meningkatkan jumlah hutang (OECD, 2020).

Pendapatan dana alokasi khusus (DAK) memiliki proporsi yang cukup besar kepada kapasitas fiskal. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 5 ayat (48) menjelaskan bahwa “dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

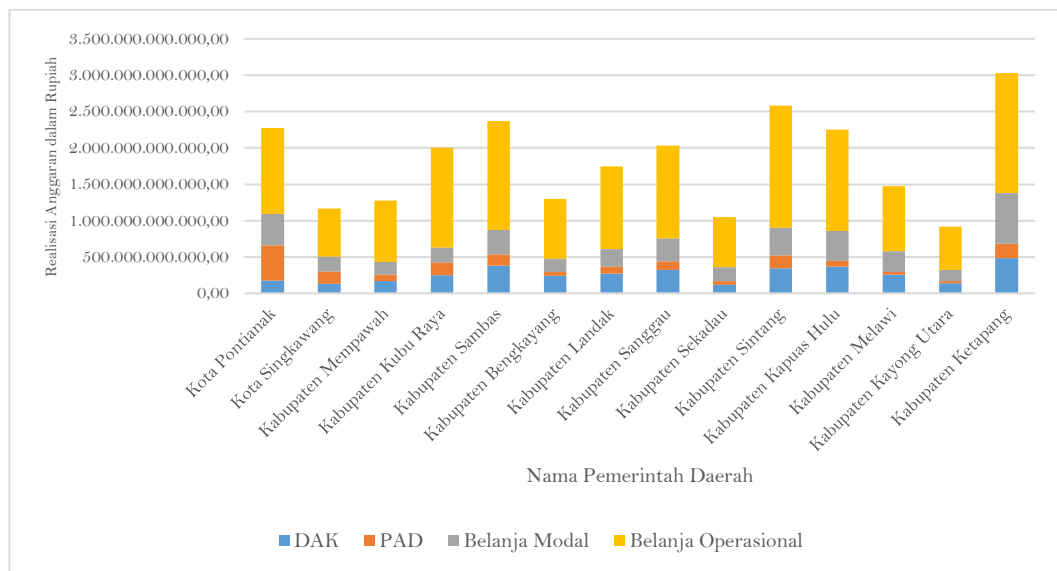


kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” (Republik Indonesia, 2014). Proporsi realisasi pendapatan DAK pemerintah daerah di Kalimantan tahun anggaran 2019 cukup besar khususnya pada pemerintah kabupaten Sambas, Ketapang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Kayong Utara memiliki realisasi DAK terkecil pada tahun 2019. Pemerintah daerah masih sangat bergantung dengan dana transfer pemerintah pusat (Nurbaida, 2019). DAK diperuntukan untuk membiayai program kerja pemerintah pusat yang ada didaerah, sehingga penggunaannya terbatas. Kapasitas fiskal daerah dibatasi oleh aturan penggunaan anggaran, khususnya pada pengeluaran non modal seperti gaji (Green & Loualiche, 2020). Pendapatan DAK sangat mempengaruhi kapasitas anggaran pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi. Penanggulangan pandemi covid 19 membutuhkan anggaran yang cukup besar khususnya pada bidang kesehatan. Pemerintah daerah masih mengandalkan DAU dan DAK dalam struktur APBD (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007). Pos-Pos pendapatan transfer utama yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah meliputi dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, dan dana transfer pemerintah provinsi lain (Sibua & Pribadi, 2019). Pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi andalan bagi daerah dalam menghadapi pandemi covid 19 karena menurunnya jumlah realisasi PAD.

Pemerintah daerah akan memprioritaskan anggaran belanja untuk membiayai program penanggulangan pandemi covid 19. Program kerja prioritas yang harus direalisasikan adalah penyediaan fasilitas kesehatan, pembelian vaksin covid 19, dan bantuan sosial bagi masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan 8,05 milyar rupiah untuk RS daerah pada masa pandemi (Info Publik, 2020). Alokasi anggaran penanganan covid 19 di Kalimantan Barat digunakan untuk pembelian alat kesehatan, alat pelindung diri APD dan masker, desinfectan, gaji tenaga kesehatan, dan pembangunan fasilitas kesehatan rujukan covid 19 (Kompas, 2020). Pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran akibat covid 19 termasuk kebutuhan program kerja, peningkatan biaya, dan pertumbuhan permintaan masyarakat atas pelayanan publik (Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2021). Proporsi terbesar realisasi belanja pemerintah daerah tahun anggaran 2019 dialokasikan kepada belanja operasional (gambar 2). Pemerintah daerah dengan realisasi belanja operasional tertinggi adalah Kabupaten Ketapang, Sintang, dan Kubu Raya. Belanja operasional digunakan untuk membiayai belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Proporsi realisasi belanja modal relatif kecil dibandingkan belanja operasional. Realisasi belanja modal tertinggi adalah Kota Pontianak, Kabupaten



Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Sambas. Belanja modal dimasa pandemi akan dialokasikan untuk penyediaan pelayanan kesehatan. Belanja pemerintah daerah akan meningkat. Penambahan jumlah kasus covid 19 berbanding lurus dengan penambahan anggaran pengeluaran pemerintah daerah sebanyak 5%-10% (Norman, 2021). Pengeluaran anggaran pengeluaran pemerintah daerah meningkat akibat covid 19. Peningkatan anggaran dialokasikan untuk aktivitas pemerintah, perlindungan sosial, kesehatan masyarakat, dan *houselessness and sleeping service* (Lilly, Tetlow, Davies, & Pope, 2020). Grafik 2 akan menggambarkan proporsi realisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat tahun 2019.



Gambar 2
Realisasi Anggaran PAD, Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2019

Sumber: Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah, 2021

Pandemi covid 19 merupakan sebuah baru fenomena yang merubah tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kejadian ini tidak pernah diprediksi dan secara cepat mendorong pemerintah untuk bertindak agar penyebaran covid 19 terkendali. Fenomena covid 19 mendorong dilakukan penelitian eksperimen untuk melihat keterkaitan antara kapasitas anggaran pemerintah daerah dengan kasus covid 19. Penelitian ini belum pernah dilakukan karena pandemi covid 19 baru terjadi pada tahun 2020. Penelitian eksperimen ini dilakukan untuk mencari pengaruh kapasitas anggaran pemerintah terhadap kondisi yang tidak terprediksi yaitu pandemi covid 19.

Penilaian kapasitas anggaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat bertujuan untuk memberikan gambaran kapasitas APBD yang dimiliki dalam menghadapi pandemi covid 19. APBD akan menjadi instrument yang penting didalam menghadapi pandemi covid 19 didaerah. Penilaian kapasitas anggaran



daerah menginginkan teori kondisi keuangan dengan indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan (Ritonga, 2014). Penilaian kapasitas anggaran pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan evaluasi atas pengelolaan APBD yang telah dilaksanakan, apakah telah optimal jika harus dihadapkan dengan kondisi pandemi covid 19 saat ini. Salah satu hal esensial dalam reformasi sektor publik pada bidang kesehatan, dimana menekankan pada kualitas pelayanan pasien, kualitas tenaga medis, dan optimalisasi pengelolaan anggaran kesehatan (Lapsley & Miller, 2019). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memadahi menjadi krusial didalam menyelesaikan masalah pandemi covid 19 yang melanda Kalimantan Barat. Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memdahai kepada masyarakat.

Kebijakan ini dituangkan dalam rencana strategis yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah. Penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang terealisasi pada tahun anggaran tertentu. Kapasitas anggaran pemerintah akan dinilai berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan dana alokasi khusus (DAK), belanja operasional, dan belanja modal. Penilaian kapasitas anggaran berdasarkan metode penilaian kondisi keuangan. Jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah daerah akan memproyeksikan secara langsung kapasitas fiskal yang dimiliki dalam menghadapi pandemi covid 19. Penanganan pandemi memerlukan anggaran yang tidak sedikit (United Nation, 2020). Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi APBD untuk penanganan pandemi (Susantono, et al., 2020). Kondisi ini berdampak kepada munculnya keberagaman program kegiatan pemerintah daerah. Anggaran pamerintah daerah akan membantu pemulihan ekonomi nasional (National Association of Countries, 2020). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan berdampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional (National Association of Countries, 2020). Selain itu, penilaian atas indeks kondisi keuangan akan menggambarkan pemerintah daerah di Kalimantan Barat yang memiliki kondisi terbaik. Semakin baik indeks kondisi keuangan suatu daerah maka akan berimplikasi terhadap kemampuan daerah menghadapi pandemi covid 19 (OECD, 2020).

TELAAH PUSTAKA

Indeks Dimensi Kondisi Keuangan

Tahapan kedua penilaian kondisi keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat adalah menghitung rasio dari indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Penilaian kondisi keuangan dilakukan dengan benchmark terhadap masing-masing sample penelitian. Selanjutnya, penilaian kondisi keuangan menggunakan teknik indeks indikator dan indeks dimensi. Perhitungan ini akan menghasilkan bobot peringkat



atas kondisi keuangan pemerintah daerah. Indeks indikator adalah teknik yang digunakan untuk mentransformasi data agar nilai yang dihasilkan menjadi wajar untuk dianalisis (Ritonga, 2014). Formula menghitung indeks indikator sebagai berikut:

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{(\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum})}{(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})}$$

Sumber: (Ritonga 2014:111)

Indeks dimensi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memperoleh bobot masing-masing indeks indikator sesuai dengan rata-rata geometri dalam aritmatika sehingga akan menghasilkan nilai 0 dan 1 (Ritonga, 2014). Perhitungan indeks dimensi teknik ini mengasumsikan bahwa bobot masing-masing indeks indikator adalah sama. Formula menghitung indeks dimensi sebagai berikut:

$$\text{Indek dimensi} = (I_{\text{indikator-1}} + I_{\text{indikator-1}} + I_{\text{indikator-1}} + \dots + I_{\text{indikator-1}})$$

Sumber: (Ritonga 2014:112)

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hal ini didasari oleh proses pengumpulan data dengan menetapkan terlebih dahulu variabel-variabel sebagai konsep dasar yang akan dihubungkan dengan teori yang ada. Penelitian ini didasari oleh teori penilaian kondisi keuangan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945. Teknik penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah dikembangkan guna membantu daerah dalam menilai dampak keuangan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara (Ritonga, 2014).

Penilaian kondisi keuangan disusun dalam enam indikator meliputi: solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan (Ritonga, 2014). Pada penelitian ini fokus penilaian kondisi keuangan terdapat pada indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau Laporan Realisasi APBD.
2. Pandemi covid 19 merupakan peristiwa yang baru terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 hingga saat penelitian ini disusun pada tahun 2021.
3. Penangan pandemi covid 19 di pemerintah daerah relatif menggunakan strategi jangka pendek pada jangka waktu kasus pertama hingga penelitian ini selesai dilakukan 30 Agustus 2021.
4. Indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan merupakan teknik yang dapat secara efektif menggambarkan kondisi keuangan daerah didalam menghadapi pandemi covid 19. Khususnya kemampuan daerah dalam menangani kasus covid 19 dalam



jangka pendek. Sebagian besar pemerintah daerah masih melakukan penanganan jangka pendek atas pandemi covid 19 (OECD, 2020).

b. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatori. Eksplanatori adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variable-variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2018).

c. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sumber data yang mungkin diperoleh melalui hasil perhitungan dan pengukuran yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif (Sugiyono, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat meliputi: Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang.

d. Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). Sample dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat.

e. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD tahun anggaran 2010-2019. Data ini diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Data covid 19 merupakan data kasus konfirmasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

f. Teknik Pengumpulan Data

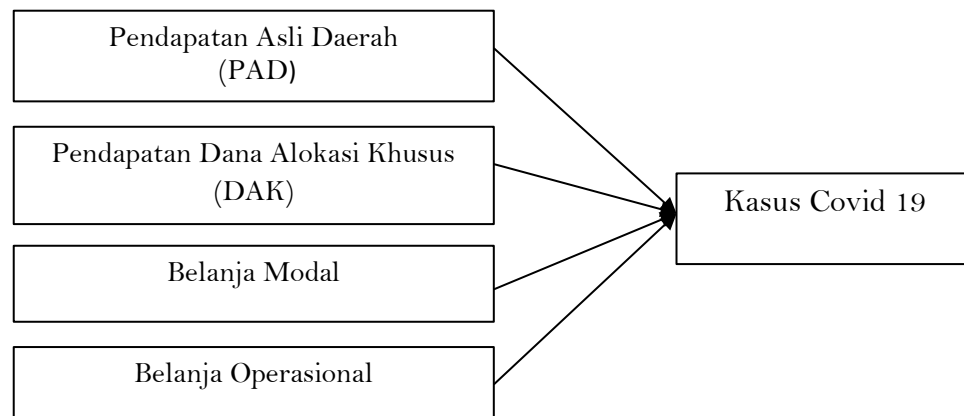
Pengumpulan data penelitian ini dengan mengakses laman portal data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

g. Teknik Analisis

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah melakukan analisis statistik untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaruh kondisi keuangan daerah terhadap covid 19. Analisis statistik dibangun dengan membangun hipotesis berdasarkan kapasitas anggaran daerah yang dimiliki. Kapasitas anggaran ini berasal dari indikator kondisi keuangan daerah solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan dan solvabilitas layanan. Kapasitas anggaran daerah diwakili oleh realisasi atas PAD, DAK, belanja operasional, dan belanja modal.

h. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu urutan logis dari peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk bagan.



Gambar 3. Kerangka Berpikir

PEMBAHASAN

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap variable-variabel yang digunakan dalam penelitian (Sujarweni, 2016). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif dari PAD, DAK, belanja operasional, dan belanja modal, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	140	22.79	26.91	25.4220	.77450
DAK	140	22.51	26.89	24.7632	.90588
Belanja Operasional	140	25.03	27.27	26.2040	.42775
Belanja Modal	140	26.06	28.15	27.2732	.46390
Kasus covid 19	140	5.81	8.15	6.8143	.60978
Valid N (listwise)	140				

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah data yang valid untuk diproses adalah 140. Kasus covid 19 mempunyai rata-rata 6,8143 dengan standar deviasi 0,60978. Kemudian diketahui rata-rata PAD sebesar 25,4220 dengan standar deviasi sebesar 0,77450. DAK memiliki rata-rata 24,7632 dengan standar deviasi 0,90588. Belanja modal memiliki rata-rata 26,2040 dengan standar deviasi 0,42775. Belanja operasional memiliki rata-rata 27,2732 dengan standar deviasi 0,46390. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat dalam kondisi yang baik. Pemerintah daerah dalam sistem otonomi sebagai pelaksana pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat selalu dituntut untuk mandiri dalam membiayai APBD pada setiap periode anggaran (Ulfah, et al., 2019).

PENGUJIAN ASUMSI KLASIK

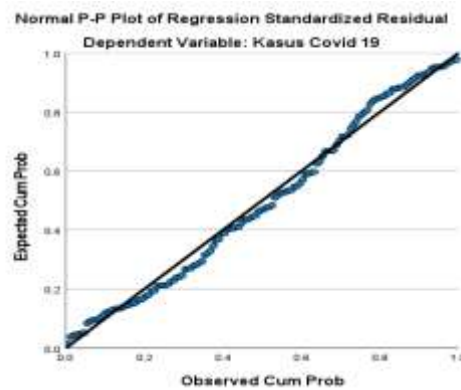
Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji modal regresi agar dapat menghasilkan estimator yang tidak bias. Model regresi akan menghasilkan



dugaan yang tidak bias harus memenuhi asumsi klasik seperti normalitas data, bebas multikolinearitas, bebas autokorelasi, dan bebas heteroskedastisitas.

A. UJI NORMALITAS

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi untuk variable terkait (dependen) dan variable bebas (independen) keduanya mempunyai kondisi distribusi normal atau tidak (Sujarweni, 2016). Pada gambar 2 grafik *normal p-p of regression standardized residual* menunjukkan persebaran data yang mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4. *Normal P-P of Regression Standardized Residual*

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAK	Belanja Modal	Belanja Operasional	Kasus Covid 19	
N		282	282	282	282	282	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	25.4557	25.0195	26.6976	27.4319	7.3323	
	Std. Deviation	1.71198	.86755	.65429	.57644	.82581	
Most Extreme Differences	Absolute	.232	.080	.135	.122	.072	
	Positive	.232	.066	.135	.071	.072	
	Negative	-.221	-.080	-.048	-.122	-.053	
Test Statistic		.232	.080	.135	.122	.072	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		<,001	<,001	<,001	<,001	.001	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.000	<,001	.000	.000	.002
		99% Lower Bound	.000	.000	.000	.000	.001
	Confidence Interval	Upper Bound	.000	.001	.000	.000	.003

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Uji Kolmogorov Smirnov menunjukan bahwa nilai Asymp.Sig untuk variable kasus covid 19 adalah 0,01; PAD <0,01; DAK <0,01; Belanja Modal <0,01; dan belanja operasional < 0,05. Berdasarkan pengujian Kolmogorov Smirnov maka dapat disimpulkan bahwa data berdasarkan Uji Kolmogorov Smirnov data yang terdistribusi normal.



B. UJI MULTIKOLINEARITAS

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah didalam model regresi terdapat korelasi antara variable independen (Sujarweni, 2016).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.347	3.073		-1.414	.160		
	PAD	-.454	.077	-.576	-5.886	<,001	.364	2.745
	DAK	.379	.077	.563	4.942	<,001	.269	3.718
	Belanja Operasional	-.018	.133	-.013	-.139	.889	.402	2.485
	Belanja Modal	.506	.199	.385	2.535	.012	.152	6.597

a. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada variable dependen diperoleh nilai VIF untuk PAD 2,745; DAK 3,718; belanja modal 2,485; dan belanja operasional 6,597. Disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam regresi.

C. UJI AUTOKORELASI

Model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi (Sujarweni, 2016). Autokorelasi terjadi pada variable yang menggunakan data runtun waktu atau time series seperti penelitian ini. Autokorelasi di uji dengan Durbin Watson. Jika model summary tersebut digambarkan dalam tabel dan grafik. Nilai Durbin Watson dinyatakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.727 ^a	.529	.515	.42481	2.158

a. Predictors: (Constant), Belanja Operasional, PAD, Belanja Modal, DAK

b. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Berdasarkan pada tabel 4 apabila nilai Durbin Watson (DW) diterjemahkan dalam perhitungan berikut ini:

$$N = 140$$

$$K = 4$$

$$dl = 1,6804 \quad 4 - dl = 2,3196$$

$$du = 1,7678 \quad 4 - du = 2,2322$$

Kesimpulan yang kita ambil adalah $DW = 2,158$ berada di antara daerah tidak terjadi autokorelasi.

D. UJI HETEROKEDASTISITAS

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variasi dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya (Sujarweni, 2016). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser.



Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B			Beta		
1	(Constant)	-1.368	1.664		-.822	.412
	PAD	-.025	.042	-.085	-.606	.546
	DAK	.038	.042	.148	.909	.365
	Belanja Operasional	.010	.072	.019	.146	.884
	Belanja Modal	.042	.108	.085	.390	.697

a. Dependent Variable: AbsUt2

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa setiap variable penelitian memberikan kontribusi diatas nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas dalam model regresi. Nilai signifikansi untuk masing-masing variable independen PAD 0,546; DAK 0,365; belanja modal 0,884 dan belanja operasional 0,697.

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variable independen yaitu PAD, DAK, belanja modal, dan belanja operasional terhadap variable dependen kasus covid 19. Analisis ini menggunakan SPSS versi 28 berikut hasil analisis regresi:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B			Beta		
1	(Constant)	-4.347	3.073		-1.414	.160
	PAD	-.454	.077	-.576	-5.886	<.001
	DAK	.379	.077	.563	4.942	<.001
	Belanja Operasional	-.018	.133	-.013	-.139	.889
	Belanja Modal	.506	.199	.385	2.535	.012

a. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Berdasarkan tabel uji regresi berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -4,347 - 0,454 X_1 + 0,379 X_2 - 0,018 X_3 + 0,506 X_4 + e$$

UJI HIPOTESIS

A. UJI SIGNIFIKANSI (UJI-F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui sejauh mana variable-variabel independen secara bersama sama berpengaruh terhadap variable dependen. Hasil uji statistik F ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		ANOVA ^a			F	Sig.
		Sum of Squares	df	Mean Square		
1	Regression	94.331	4	23.583	67.135	<.001 ^b
	Residual	97.303	277	.351		
	Total	191.634	281			



a. Dependent Variable: Kasus Covid 19

b. Predictors: (Constant), Belanja Operasional, PAD, Belanja Modal, DAK

Berdasarkan hasil uji simultan maka diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,01 karena nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,01 < 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dengan kata lain adanya pengaruh secara signifikan antara PAD, DAK, belanja modal, dan belanja operasional secara simultan atau bersama sama terhadap kasus covid 19 yang terjadi di Indonesia. Anggaran yang direalokasi berasal dari anggaran non prioritas dan belanja modal yang tidak memiliki kaitan dengan pandemi (Hasibuan, Dermawan, Ginting, & Muda, 2020). Pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran akibat covid 19 termasuk kebutuhan program dan pelayanan publik, peningkatan biaya, dan pertumbuhan permintaan masyarakat atas pelayanan publik (Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2021). pemerintah daerah di Kalimantan Barat sangat bergantung kepada kapasitas anggaran dari PAD dan DAK sebagai sumber utama dalam menghadapi covid 19. Sedangkan kapasitas anggaran atas belanja modal dan belanja operasional sebagai upaya nyata dalam menanggulangi pandemi covid 19 yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan, pelayanan sosial, dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan masih relatif rendah (Nurbaida, 2019). Covid 19 membawa dampak negatif terhadap penyerapan anggaran pada lembaga pemerintah (Suyitno, 2020). Kinerja realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan optimal agar pandemi covid 19 dapat teratasi.

B. UJI SIGNIFIKANSI PARSIAL (UJI-t)

Pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara parsial. Untuk mengetahui bahwa variable independen (PAD, DAK, belanja operasional, dan belanja modal) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (kasus covid 19) maka dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-4.347	3.073		-1.414	.160
	PAD	-.454	.077	-.576	-5.886	<.001
	DAK	.379	.077	.563	4.942	<.001
	Belanja Operasional	-.018	.133	-.013	-.139	.889
	Belanja Modal	.506	.199	.385	2.535	.012

a. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial diketahui bahwa belanja operasional memiliki tingkat signifikansi 0,889 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka hipotesis ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja modal tidak berpengaruh kepada kasus covid 19. Sedangkan PAD, DAK, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19 yang terjadi



pada wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran PAD, DAK, dan belanja modal pemerintah daerah sangat berperan dalam menanggulangi pandemi covid 19 di Kalimantan Barat. Dana transfer pemerintah pusat, PAD, dan pendapatan lain-lain berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Nawawi, 2021). Strategi penanganan covid 19 di Kalimantan Barat akan dilakukan dalam jangka waktu pendek. Hal ini menyebabkan kapasitas anggaran dari PAD, DAK, dan belanja modal sangat berperan didalam menghadapi kejadian tidak terduga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih melakukan strategi jangka pendek untuk menghadapi pandemi covid 19 (OECD, 2020). Pada masa pandemi covid 19 pemerintah menggunakan startegi pengelolaan APBN dan APBD dengan siklus ekonomi jangka pendek agar mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi (Subekan & Iskandar, 2020). anggaran pendapatan dan belanja pemerintah berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi daerah dan nasional jika dapat dialokasikan kepada penanganan pandemi (Subekan & Iskandar, 2020).

C. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan keeratan hubungan variable independen dan variable dependen. Pengujian ini akan menilai seberapa jauh model regresi dapat menjelaskan variasi variable dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 ^a	.529	.515	.42481

a. Predictors: (Constant), Belanja Operasional, PAD, Belanja Modal, DAK

b. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,529 atau sebesar 52,9%. Hal ini dapat diartikan variable independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 52,9% dari variable dependen (kasus covid 19) sedangkan sisanya 47,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variable tersebut. Sementara itu, koefisien korelasi yang ditunjukkan dengan R pada tabel adalah 0,727. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara variable dependen (kasus covid 19) dengan variable independen (PAD, DAK, belanja operasional, dan belanja modal) sebesar 72,7 %. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk *refocusing* dan *reallocating* anggaran bagi kegiatan yang tidak prioritas dan memberikan stimulus fiskal agar mengurangi dampak pandemi dan perbaikan ekonomi nasional (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Realokasi anggaran menjadi respon utama banyak pemerintah di asia untuk menghadapi krisis akibat pandemi. Alokasi utama diperuntukan untuk program kesehatan dan juga memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat (ADB, 2021). Pandemi meningkatkan permintaan masyarakat atas pelayanan publik dari pemerintah daerah, namun kondisi ini bertepatan dengan penurunan penerimaan pajak daerah (Green & Loualiche, 2020).



INDEKS KAPASITAS ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI KALIMANTAN BARAT

Analisis statistik untuk mengetahui pengaruh kapasitas anggaran dan kasus covid 19 yang terjadi di Kalimantan Barat menghasilkan sebuah indikasi bahwa kapasitas anggaran memiliki pengaruh 52,9% terhadap kasus covid 19. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan pemerintah daerah yang baik akan mempercepat proses penanggulangan pandemi covid 19. Selain itu, terdapat pengaruh signifikan PAD, DAK, dan belanja operasional terhadap kasus covid 19. Indikator kapasitas anggaran dipilih berdasarkan teori kondisi keuangan yang menggunakan PAD, DAK, belanja modal dan belanja operasional sebagai nilai yang digunakan dalam perhitungan. Kapasitas anggaran secara langsung sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, untuk mengetahui pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan terbaik didalam menghadapi pandemi covid 19 maka dilakukanlah perhitungan indeks dimensi berdasarkan indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Berikut ini adalah hasil perhitungan indeks dimensi kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat tahun 2010-2019.

a. SOLVABILITAS ANGGARAN

Hasil penilaian atas indeks dimensi solvabilitas anggaran (tabel 10) tertinggi dari tahun 2010 hingga tahun 2019 yaitu diperoleh Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, dan Kota Pontianak. Nilai ini dapat diartikan bahwa tingkat solvabilitas anggaran pada pemerintah daerah tersebut merupakan yang terbaik di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kayong Utara memperoleh nilai terendah. Pemerintah daerah mengalami penurunan penerimaan pajak akibat pandemi (Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2021). Penurunan penerimaan pajak berakibat kepada anggaran pemerintah daerah di tahun selanjutnya (Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2021). krisis akibat pandemi berdampak kepada keuangan pemerintah daerah, yaitu meningkatnya belanja dan menurunnya pendapatan (OECD, 2020). Krisis keuangan pemerintah kota dan kabupaten mengakibatkan jumlah belanja yang lebih besar (OECD, 2020). Pemerintah daerah masih mengandalkan DAU dan DAK dalam struktur APBD (Hidayat, Pratomo, & Harjito, 2007). Pemerintah daerah melakukan strategi realokasi dan refocusing anggaran pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial selama pandemi covid 19 (Sanjaya, 2020). Realisasi belanja daerah mengalami perubahan akibat penanganan pandemic covid 19 (Basri & Gusnardi, 2021).



Tabel 10. Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah	Solvabilitas Anggaran									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Pontianak	0,530	0,631	0,838	0,589	0,548	0,691	0,640	0,322	0,921	0,955
Kota Singkawang	0,441	0,636	0,471	0,249	0,486	0,435	0,420	0,299	0,721	0,484
Kabupaten Mempawah	0,499	0,363	0,162	0,208	0,312	0,389	0,328	0,098	0,392	0,204
Kabupaten Kubu Raya	0,450	0,261	0,239	0,352	0,568	0,452	0,624	0,083	0,517	0,102
Kabupaten Sambas	0,284	0,154	0,099	0,223	0,259	0,289	0,096	0,027	0,360	0,193
Kabupaten Bengkayang	0,003	0,177	0,405	0,486	0,172	0,560	0,420	0,040	0,443	0,553
Kabupaten Landak	0,417	0,706	0,573	0,832	0,912	0,604	0,853	0,161	0,570	0,366
Kabupaten Sanggau	0,276	0,157	0,213	0,202	0,433	0,634	0,143	0,013	0,620	0,431
Kabupaten Sekadau	0,881	0,730	0,536	0,657	0,567	0,653	0,595	0,929	0,734	0,491
Kabupaten Sintang	0,432	0,317	0,146	0,255	0,411	0,478	0,383	0,171	0,660	0,109
Kabupaten Kapuas Hulu	0,751	0,742	0,445	0,635	0,748	0,657	0,730	0,302	0,561	0,496
Kabupaten Melawi	0,531	0,363	0,244	0,362	0,328	0,622	0,765	0,210	0,000	0,219
Kabupaten Kayong Utara	0,789	0,817	0,823	0,479	0,695	0,578	0,654	0,253	0,670	0,411
Kabupaten Ketapang	0,517	0,818	0,524	0,662	0,250	0,415	0,338	0,165	0,719	0,405

Sumber: Hasil perhitungan, 2021

b. KEMANDIRIAN KEUANGAN

Hasil penilaian indeks dimensi kemandirian keuangan (tabel 12) pemerintah Kota Pontianak menempati peringkat terbaik dalam hal kemandirian keuangan daerah selama tahun 2010 hingga 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Pontianak dapat memanfaatkan seluruh potensi daerah yang dimiliki untuk menunjang seluruh kegiatan operasionalnya. Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Kota Pontianak memiliki kemandirian keuangan terbaik. Sedangkan kemandirian keuangan terendah diperoleh oleh Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Bengkayang. Ini mengindikasikan bahwa ketika kabupaten tersebut masih relatif rendah dalam hal kemandirian keuangan daerah. Akibat covid 19 Pemerintah daerah mengalami penurunan pendapatan (Lilly, Tetlow, Davies, & Pope, 2020). Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan pajak, non pajak, fees, dan retribusi (Lilly, Tetlow, Davies, & Pope, 2020). Penurunan pendapatan pemerintah daerah akan berdampak negatif pada anggaran, sehingga diperlukan manajemen keuangan yang baik agar tidak meningkatkan jumlah hutang (OECD, 2020). Negara bagian dan pemerintah daerah melakukan penyesuaian kepada anggaran, untuk menurunkan dampak fiskal dari pendapatan dan belanja untuk menahan resesi dan mempercepat perbaikan ekonomi (Auerbach, Gale, Lutz, & Sheiner, 2020). Indikator kemandirian keuangan yang meningkat menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah dapat mengeksplorasi sumber pendapatan baru (Maizunati, 2017). Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang meningkat dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor potensial seperti sektor konstruksi, manufaktur, dan perdagangan (Maizunati, 2017). Kemandirian keuangan daerah didalam menghadapi covid 19 masih rendah (Onibala, Rotinsulu, & F.Rorong, 2021).



Tabel 11. Indeks Dimensi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah	Kemandirian Keuangan									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Pontianak	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Kota Singkawang	0,377	0,357	0,286	0,293	0,487	0,528	0,435	0,437	0,494	0,608
Kabupaten Mempawah	0,147	0,144	0,123	0,216	0,235	0,196	0,178	0,116	0,161	0,204
Kabupaten Kubu Raya	0,056	0,368	0,184	0,244	0,302	0,223	0,233	0,246	0,352	0,308
Kabupaten Sambas	0,194	0,126	0,146	0,118	0,349	0,194	0,194	0,298	0,166	0,187
Kabupaten Bengkayang	0,106	0,061	0,053	0,070	0,075	0,091	0,094	0,000	0,059	0,058
Kabupaten Landak	0,097	0,089	0,109	0,096	0,293	0,085	0,098	0,202	0,099	0,132
Kabupaten Sanggau	0,150	0,185	0,153	0,213	0,213	0,253	0,200	0,213	0,172	0,152
Kabupaten Sekadau	0,106	0,168	0,077	0,206	0,106	0,126	0,117	0,335	0,132	0,068
Kabupaten Sintang	0,259	0,308	0,179	0,215	0,252	0,240	0,187	0,063	0,381	0,204
Kabupaten Kapuas Hulu	0,101	0,062	0,065	0,037	0,171	0,134	0,093	0,136	0,034	0,037
Kabupaten Melawi	0,170	0,000	0,000	0,043	0,002	0,057	0,068	0,056	0,032	0,000
Kabupaten Kayong Utara	0,000	0,016	0,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,011
Kabupaten Ketapang	0,203	0,162	0,194	0,400	0,192	0,224	0,212	0,157	0,225	0,193

Sumber: hasil perhitungan, 2021

c. SOLVABILITAS LAYANAN

Indeks solvabilitas layanan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat menempatkan Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pemerintah daerah dengan indeks tertinggi (tabel 12). Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kabupaten ini dapat memenuhi segala pelayanan publik dengan optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada di sana. Wilayah Kabupaten Kayong Utara memiliki geografis kepulauan dan merupakan kabupaten baru yang ada di Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu terletak paling utara, kabupaten yang letaknya paling jauh dari ibu kota provinsi, dan kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi geografis tersebut Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Kapuas Hulu masih dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Hal ini juga didorong dengan jumlah penduduk yang proporsional Kayong Utara 127.301 jiwa dan Kapuas Hulu 246.772 jiwa (BPS, 2018) sehingga kualitas pelayanan publik dapat optimal.

Solvabilitas layanan yang terendah yaitu terdapat di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Sambas. Letak geografis Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah terletak paling dekat dengan ibu kota provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa letak geografis wilayah yang dekat dengan ibu kota provinsi tidak menjamin adanya kualitas pelayanan publik yang optimal. Hal lain yang mendorong rendahnya solvabilitas layanan adalah demografi kabupaten tersebut yang tidak proporsional dimana Kabupaten Kubu Raya memiliki jumlah penduduk 607.560 jiwa, Kabupaten Mempawah 306.358 jiwa, dan Kabupaten Sambas 636.848 jiwa (BPS, 2018) Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten tersebut masih perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dimasa pandemi covid 19 pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang optimal agar kasus covid 19 di daerah menurun. fasilitas kesehatan menjadi sangat krusial dimasa pandemi ini. pemerintah daerah yang dapat memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang optimal akan lebih mudah menurunkan jumlah kasus covid 19. Pemerintah kabupaten dan kota berfokus pada menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mudah diperoleh dengan biaya yang murah (OECD, 2020). Upaya pemerintah daerah untuk dapat memberikan



pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dapat terlihat dari peningkatan nilai rasio solvabilitas layanannya (Cipto, 2018). Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, keamanan, dan kebahagiaan bagi masyarakat miskin pada pandemi covid 19 (Tuwu, Laksmo, Humaerah, & Harjudin, 2021).

Tabel 12. Indeks Dimensi Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah	Solvabilitas Layanan									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Pontianak	0,051	0,125	0,077	0,167	0,105	0,097	0,035	0,112	0,138	0,133
Kota Singkawang	0,400	0,394	0,263	0,478	0,369	0,417	0,285	0,280	0,406	0,400
Kabupaten Mempawah	0,202	0,000	0,228	0,165	0,270	0,423	0,382	0,206	0,148	0,284
Kabupaten Kubu Raya	0,019	0,102	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,039	0,049	0,026
Kabupaten Sambas	0,053	0,120	0,055	0,036	0,056	0,309	0,040	0,089	0,030	0,221
Kabupaten Bengkayang	0,192	0,346	0,171	0,193	0,514	0,411	0,378	0,398	0,219	0,309
Kabupaten Landak	0,207	0,150	0,182	0,210	0,291	0,615	0,377	0,236	0,217	0,250
Kabupaten Sanggau	0,073	0,105	0,145	0,093	0,088	0,287	0,143	0,196	0,120	0,229
Kabupaten Sekadau	0,512	0,413	0,384	0,409	0,436	0,646	0,419	0,216	0,481	0,461
Kabupaten Sintang	0,149	0,193	0,152	0,658	0,177	0,347	0,392	0,466	0,415	0,505
Kabupaten Kapuas Hulu	0,705	0,922	0,762	0,726	0,917	1,000	1,000	0,827	1,000	1,000
Kabupaten Melawi	0,367	0,458	0,347	0,458	0,642	0,217	0,510	0,675	0,343	0,774
Kabupaten Kayong Utara	1,000	1,000	1,000	1,000	0,996	0,263	0,780	0,953	0,794	0,904
Kabupaten Ketapang	0,238	0,353	0,282	0,287	0,344	0,036	0,162	0,258	0,449	0,653

Sumber: hasil perhitungan, 2021

KESIMPULAN

- Secara simultan terdapat pengaruh kapasitas anggaran terhadap kasus covid 19. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis dimana nilai sig. 0,001, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Kasus covid 19 yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat dapat ditanggulangi dengan kapasitas anggaran pemerintah daerah yang baik. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara optimal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi covid 19. Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan menjadi sangat krusial untuk di hadirkan dalam masa pandemi saat ini.
- Secara parsial terdapat pengaruh dan tidak berpengaruh pada kapasitas anggaran pemerintah daerah terhadap kasus covid 19.
 - Terdapat pengaruh secara signifikan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kasus covid 19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,001. Maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19.
 - Terdapat pengaruh signifikan atas Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kasus covid 19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,001. Maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial DAK berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19.
 - Tidak ada pengaruh secara signifikan atas belanja operasional terhadap kasus covid 19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,889. Dengan ini hipotesis ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa belanja operasioanal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19.



- d. Terdapat pengaruh signifikan atas belanja modal terhadap kasus covid 19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,012. Dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19.

Kapasitas anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat secara umum berada dalam kondisi baik. Pemerintah Kabupaten Sekadai, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, dan Kota Pontianak diproyeksikan memiliki kemampuan yang baik dari sisi pemenuhan belanja dimasa pandemi dalam menghadapi pandemi covid 19. Hal ini ditunjukkan dengan indeks solvabilitas anggaran terbaik selama periode 2010-2019. Pemerintah Kota Pontianak diproyeksikan tidak rentan terhadap sumber pendapatan diluar kendalinya baik dari dalam negeri ataupun luar negeri dimasa pandemi covid 19. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kemandirian keuangan kota Pontianak yang terbaik selama tahun 2010-2019. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik dan menyediakan sarana publik bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan indeks solvabilitas layanan selama tahun 2010-2019. Kondisi ini diproyeksikan akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dalam meyelenggarakan pelayanan kesehatan dimasa pandemi covid 19.

Penelitian ini hanya menggunakan sample pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Perumusan hipotesis masih terbatas pada kapasitas anggaran dari PAD, DAK, belanja modal dan belanja operasional. Teknik analisis yang digunakan masih sebatas pada teknik analisis statistik sederhana untuk mengetahui pengaruh kapasitas anggaran terhadap kasus covid 19. Penilaian kondisi keuangan hanya menggunakan indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Berdasarkan koefisien determinasi bahwa 47,1% dapat dijelaskan dengan variable lain. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variable dependen lain seperti aset, kewajiban, ekuitas pemerintah daerah ataupun variable pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU), belanja tidak terduga, dan pembiayaan. Menggunakan periode tahun yang berbeda, pemerintah daerah lain di luar pulau Kalimantan, atau memodifikasi variable dependen. Hal ini diharapkan dapat memberikan penelitian yang lebih objektif dan menambah kajian atas kejadian pandemi covid 19 di daerah.

DAFTAR REFERENSI

- ADB. (2021, February). Addressing the Covid 19 Crisis: Lessons from Support for Public Financial Management. *Covid Series-2*.
- American Hospital Association. (2020). *Hospitals and Health Systems Face Unprecedented Financial Pressures Due to Covid 19*. USA: American Hospital Association.
- Antara. (2020, Mei 11). *Sintang anggarkan Rp40 miliar untuk penanganan COVID-19*. (T. N. Andi, Producer, & Antara) Retrieved September 1, 2021, from Antarankalbar: <https://kalbar.antaraneews.com/berita/418000/sintang-anggarkan-rp40-miliar-untuk-penanganan-covid-19>



- Antarakalbar. (2020, Juli 6). *Anggaran Kabupaten Kayong Utara masih difokuskan penanganan COVID-19*. (Dedi, Producer) Retrieved September 1, 2021, from Antarakalbar: <https://kalbar.antaranews.com/berita/426418/anggaran-kabupaten-kayong-utara-masih-difokuskan-penanganan-covid-19>
- Auerbach, A., Gale, B., Lutz, B., & Sheiner, L. (2020). Fiscal Effects of Covid 19. *BPEA Conference Drafts* (pp. 1-60). USA: Brookings Papers on Economic Activity.
- Basri, Y. M., & Gusnardi. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33-48. doi:<https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.980>
- BPS Kalimantan Barat. (2020, Agustus 5). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/>
- Cipto, P. (2018). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011-2015. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1). Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59246>
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. (2021). *Data Covid-19*. Pontianak: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Retrieved April 13, 2021, from <https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/>
- Green, D., & Loualiche, E. (2020). *State and Local Government Employment in the Covid 19 Crisis*. Harvard University. Boston: Harvard Business School.
- Haruhiko, K. (2020). Covid 19 and the global economy: impact and challenges from asia's perspective. Japan: Bank of Japan.
- Hasibuan, G. L., Dermawan, D., Ginting, H. S., & Muda, I. (2020). Allocation of Covid 19 Epidemic Funding Budgets In Indonesia. *International Journal of research and review*, 7(5), 75-80.
- Hidayat, P., Pratomo, W. A., & Harjito, D. A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 213-222.
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triyani, M. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten di Kalimantan. *Jurnal Inventory*, 175-182. doi:[10.25273/inventory.v4i2.7675](https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7675)
- iNewsKalbar.id. (2020, Agustus 7). *Terdampak Pandemi, Pendapatan Kalbar berkurang Rp800 miliar*. (R. Yunanto, Editor, & Antara) Retrieved September 1, 2021, from iNewsKalbar.id: <https://kalbar.inews.id/berita/terdampak-pandemi-pendapatan-kalbar-berkurang-rp800-miliar>
- Info Publik. (2020, April 18). *Pemkot dan DPRD Singkawang Sepakat Anggaran Penanganan Covid-19 Rp20,21 Miliar*. (Juli, Producer, & Info Publik Portal Berita Info Publik) Retrieved from Info Publik Portal Berita Info Publik: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/450393/pemkot-dan-dprd-singkawang-sepakat-anggaran-penanganan-covid-19-rp20-21-miliar>
- Kabupaten Kubu Raya. (2021, Agustus 1). *Kabupaten Kubu Raya Serapan Anggaran Covid-19 Tertinggi Se-Kalbar*. Retrieved September 1, 2021, from Dinas



- Kesehatan Kabupaten Kubu Raya: <https://dinkes.kuburayakab.go.id/read/271/kabupaten-kubu-roya-serapan-anggaran-covid-19-tertinggi-sekalbar>
- Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Data Sebaran*. Jakarta: Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved April 10, 2021, from <https://covid19.go.id/>
- Kompas. (2020, Maret 26). *Pemkab Landak Realokasi APBD Rp 20 Miliar untuk Penanganan Corona*. (H. Cipta, Producer, & Kompas) Retrieved September 1, 2021, from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/03/26/20003101/pemkab-landak-realokasi-apbd-rp-20-miliar-untuk-penanganan-corona>
- Kota Pontianak. (2021 a, Januari 5). *Alokasikan Rp53 miliar Tangani Covid-19*. Retrieved September 1, 2021, from Pemerintah Kota Pontianak: <https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Alokasikan-Rp53-miliar-Tangani-Covid~19>
- Kota Pontianak. (2021 b, Agustus 3). *Pemerintah Pusat Perpanjang PPKM Level 4, Pontianak Satu Diantaranya*. Retrieved September 1, 2021, from Berita Pemerintah Kota Pontianak: <https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Pemerintah-Pusat-Perpanjang-PPKM-Level-4,Pontianak-Satu-Diantaranya>
- Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 1355-1370.
- Lilly, A., Tetlow, G., Davies, O., & Pope, T. (2020). *The cost of Covid 19 The Impact of Coronavirus on the UK's public finance*. Institute for government. UK: Institute for government.
- Maizunati, N. A. (2017, April 2). Financial Condition Analysis of Magelang City Government in The city Cluster in Java-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2).
- Ministry of Housing, Communities and Local Government. (2021). *Local Government finance in the pandemic*. The comptroleer and auditor general. UK: National Audit Office.
- National Association of Countries. (2020). *Covid 19 Impact on country finances dan implications for the US economy*. USA: NACo.
- Nawawi, A. (2021). Analisis Respon Belanja Apbd Terhadap Transfer Tidak Bersyarat Dari Pemerintah Pusat: Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1), 39-55. doi:<https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art95>
- Norman, J. (2021). *Budget 2021 Protecting The Jobs and Livelihoods of The British People*. UK: The House of Commons.



- Nugroho, H., & Muhyiddin. (2021, April 1). Indonesia Development Update A year of Covid 19: A long road to recovery and acceleration of Indonesia's development. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1-20. doi:10.36574/jpp.v5i1
- Nurbaida, N. (2019). Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2008-2018. *Jurnal soso2*, 7(1), 25-33.
- OECD. (2020). *Covid19-crisis responses in ASEAN Member States*. OECD. Retrieved from oecd.org/coronavirus
- OECD. (2020). *The Impact of the Covid 19 crisis on regional and local governments: main findings from the joint CoR-OECD survey*. OECD Regional Development Papers.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & F.Rorong, I. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67-89. doi:<https://doi.org/10.35794/jpek.35097.22.2.2021>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2021, September 3). *Gubernur: Refocusing Guna Percepatan Ekonomi Dan Kesehatan*. (N. Muharrami, Editor) Retrieved September 10, 2021, from Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat: <https://kalbarprov.go.id/berita/gubernur-refocusing-guna-percepatan-ekonomi-dan-kesehatan.html>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29, 142-164.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), 274-290. doi:<https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. Medan: Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora.
- Sibua, N., & Pribadi, F. (2019, Juni). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 02(03), 343-357.
- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (studi kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 27-37.
- Subekan, A., & Iskandar, A. (2020). Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Anggaran Defisit : Analisis Konjungtur Ekonomi. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 20(2), 142-152. doi:<http://dx.doi.org/10.30596%2Fekonomikawan.v20i2.5561>



- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (28 ed., p. 81). Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS* (1 ed.). (Mona, Ed.) Bantul, Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43-51.
- Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 67-74. doi:<https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2446>
- The PRAKARSA, & TAFJA. (2020). *Towards sustainable tax policies in the ASEAN region: The case of corporate tax incentives*. Hanoi, Vietnam: VEPR, Oxfam in Vietnam, The Prakarsa, & Tafja.
- Tuwu, D., Laksmono, B. S., Humaerah, A., & Harjudin, L. (2021). Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 97-110. doi:<https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2158>
- Ulfah, A. K., Fernanda, D., Rahmaniar, Mediyanti, S., Agustiana, Azlina, & Andina, A. (2019). Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerinath Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains* (pp. 113-116). SAINTEKS. Retrieved from <https://seminar-id.com/semnas-sainteks2019.html>
- Yasin, M., Riyadi, S., & Ingga, I. (2017). Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), 493-510.
- Yasrie, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(2), 67-81.
- Zami, A. (2020, April). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Business*, 3(2), 121-130.